

Konsolidasi Nasionalisme Indonesia Menghadapi Era Demokrasi Global

Sidratahta Mukhtar

Abstrak

Dari perspektif politik, globalisasi yang diikuti demokratisasi merupakan tren baru yang berkembang dan melanda banyak Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu dampak dari globalisasi tersebut adalah merosotnya nasionalisme. Namun tentu juga ada banyak manfaat dapat di ambil dari perkembangan tersebut.

Nasionalisme sendiri, pemahaman dan pemaknaannya dewasa ini, sangat di pengaruhi oleh perubahan dan pergeseran kepentingan politik nasional dan internasional. Jika di tahun 1940-an nasionalisme di artikan sebagai alat politik Negara yang di gunakan untuk kepentingan politis dan militer, dewasa ini telah berubah menjadi alat kepentingan ekonomi Negara. Untuk itu yang penting di perhatikan dan harus selalu di tegakan adalah supremasi hukum, *rule of law* yang tegas. Tanpa hal itu nasionalisme seakan menjadi sesuatu yang hampa makna.

Kata Kunci: globalisasi, demokrasi, nasionalisme.

Pengantar

Banyak Negara di era demokrasi global dewasa ini yang tengah menghadapi masalah-masalah nasionalisme. Prinsip-prinsip pokok nasionalisme seperti persamaan nasib, faktor geografis, sejarah, politik, agama, identitas dan faktor-faktor lainnya semakin merosot akibat pengaruh globalisasi dan demokratisasi. Hal ini merupakan tren baru yang berkembang secara massif di Indonesia sejak awal 1990-an. Tulisan ini akan menjelaskan konsep-konsep dan berbagai debat tentang nasionalisme oleh para ilmuwan yang konsern dengan nasionalisme dan demokrasi. Tulisan ini juga akan memotret dinamika konsolidasi demokrasi di Indonesia dan proses konsolidasi nasionalisme di dalamnya.

Dua model konsolidasi: Nasionalisme dan demokrasi

Pada akhir periode kekuasaan orde baru, Indonesia di perhadapkan dengan krisis multi-dimensional yang amat parah. Dampak krisis tersebut luar biasa, yakni memicu turun tahtanya Presiden Soeharto, terjadinya amandemen UUD 1945, liberalisasi politik dan ekonomi, dan lain sebagainya. Kaum reformis mendorong perubahan pada lembaga-lembaga politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Di masa lalu, sentralisasi kekuasaan terjadi akibat salah menafsirkan konstitusi yang berlaku, sehingga memungkinkan adanya praktik kekuasaan yang memusat pada presiden. Semula amandemen UUD 1945 di tentang oleh sejumlah politisi konservatif yang menghawatirkan perpecahan Negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun kenyataannya, MPR berhasil melakukan amandemen UUD 1945, yang antara lain memperjelas pembagian dan pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara Negara. Hubungan presiden dan DPR misalnya, relative memiliki perimbangan setelah DPR memiliki hak legislasi, kontrol, hak interpelasi, hak angket dan hak imunitas¹.

Konsolidasi demokrasi itu juga merupakan eksperimentasi politik kenegaraan yang menegangkan. Pada tingkat lingkungan global, dunia internasional dengan mengalami krisis akibat hilangnya kekuatan blok Timur (Uni Sovyet), sehingga tinggal Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) yang mendominasi dunia. Dalam konteks itu, nilai-nilai liberalisme dan demokrasi barat menjadi nilai-nilai universal yang di paksakan kepada Negara-negara berkembang dan belahan dunia yang lainnya, sehingga mempengaruhi dan menghilangkan nasionalisme negara-negara lain.

Pada tingkat domestik, Indonesia mengalami kesulitan dalam memilih model konsolidasi demokrasi yang sesuai dengan budaya Indonesia. Akhirnya kita cukup berhasil melewati masa transisi politik yang penuh dengan konflik politik dan kepartaian itu, meskipun tahap-tahap demokratisasi yang kita jalani masih belum ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat yang menghendaki di tegakkannya substansi demokrasi, terutama kesejahteraan rakyat.

Proses perubahan politik yang monumental itu di sebut Burhan Magenda sebagai proses akhir dari konsolidasi nasionalisme Indonesia. Berbagai prediksi para ahli politik dari luar negeri yang menyebut kemungkinan terjadinya “perpecahan”, Balkanisasi Indonesia, tidak

¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana PM Group, 2010, halm 24-25.

terbukti. Menurut Indonesianis Terry Lynn Karl, sesungguhnya Indonesia memiliki hampir semua bahan (*ingredient*) yang di butuhkan untuk menjadi negara maju seperti India dan Cina. Sebagai negara yang juga memiliki kelas menengah terdidik yang cukup besar, akar kultural yang mapan, masa lalu yang penuh kisah kejayaan, dan rasa nasionalisme yang tinggi, seharusnya Indonesia bisa lebih cepat melangkah ke kehidupan yang lebih baik. Namun, yang kita alami selama ini justru sebaliknya. Wajah kita adalah wajah dengan sejumlah paradoks. Meskipun kaya akan sumber daya alam dan di karuniai tanah yang subur, Indonesia terjebak kedalam situasi yang disebut oleh Terry Karl sebagai paradoks keberlimpahan (*the paradox of plenty*): Negara kaya, tapi miskin.²

Bebagai pendapat yang memandang Indonesia sebagai negara paradoks dengan kecenderungan menjadi negara gagal itu tidak terbukti. Professor Burhan Magenda memandang sebaliknya, bahwa Indonesia memasuki tahap akhir konsolidasi nasionalisme dalam dua aspek pokok. Pertama, menguatnya ideologi nasionalisme dalam kerangka “*nation building*”. Kedua, berfungsinya dengan baik lembaga-lembaga politik dalam kerangka “*state building*”.

Dalam konteks demokrasi dapat di katakan, Indonesia memang Negara yang baru kembali mempraktikan sistem demokrasi secara substansial pasca-Orde Baru, sejak 1998 dan selama empat puluhan tahun sebelumnya menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila yang di golongankan sebagai sistem birokrasi yang otoriter (*bureaucratic authoritarian*). Tetapi konsolidasi nasionalisme Indonesia mengalami kematangan dalam tiga setengah abad di bawa era kolonialisme. Pendekatan dan semangat nasionalisme itulah yang mendorong keterlibatan dan peran-peran strategis Indonesia di dalam konteks kawasan Asia Afrika maupun global. Hasil konferensi Asia Afrika misalnya, telah menjadikan ideologi Pancasila sebagai sumber rujukan dan spirit nasionalisme kawasan dan memerdekakan banyak Negara di kawasan Asia Afrika.³

Upaya untuk membangun demokrasi ala Indonesia itu nampaknya di dorong oleh pandangan bahwa Indonesia memiliki sistem yang berbeda dengan negara-negara lain, karena

² Burhan Djibir Magenda, “Konsolidasi Nasionalisme Indonesia, Mengatasi Tantangan Globalisasi dan Primordialisme”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Politik pada Fisip UI, Depok, 6 Desember 2008. Rizal Sukma, “Paradoks Posisi Indonesia”, makalah ceramah ilmiah, PB HMI, 5 Februari 2009.

³ Hasil diskusi dengan profesor penulis di Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS), Amb. Charles Salmon Jr. September 2008.

Indonesia menganut prinsip kekeluargaan, persatuan dan kesatuan. Konsepsi negara integralistik yang di tawarkan Soepomo bersumber dari argumentasi seperti di atas. Soepomo mengatakan, Indonesia bukan negara liberal dan juga bukan negara komunal. Sedangkan proklamator Indonesia Mohammad Hatta menyebutnya sebagai konsep demokrasi ala Indonesia, yang memiliki sifat demokratis masyarakat asli Indonesia, bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivisme yang hidup dalam sanubari setiap masyarakat Indonesia, seperti bentuk tolong menolong dalam tahta kehidupan masyarakat agraris Indonesia. Hatta mengatakan, sistem kolektivisme itu melakukan proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.⁴

Berkaitan dengan nasionalisme dan demokrasi Hatta telah mengingatkan kita akan pentingnya kebangsaan (*nationhood*) ketika berhadapan dengan negara-negara lain. Kebangsaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan terikat dengan suatu tanah air (*home country*), suatu wilayah. Di dalamnya termasuk kesamaan nasib, pengalaman sejarah, tetapi bukan etnik, agama atau unsur primordialisme lainnya. Menurut Hatta, inti kebangsaan (nasionalisme) adalah cinta tanah air. Selama masih ada penjajahan, selama itu pula di perlukan kebangsaan.⁵

Dalam konteks hubungan internasional, Hatta mengungkapkan bahwa kebangsaan berguna untuk menjadi anggota terhormat dalam hubungan antarbangsa; bangsa yang diperbudak atau dijajah berdasarkan norma hubungan antar negara tidak dianggap sebagai anggota aktif dalam hubungan internasional. Kesimpulan Hatta, kebangsaan atau nasionalisme masih lebih utama dari pada internasionalisme. Secara konkret Hatta merumuskan kebijaksanaan luar negeri yang mengutamakan pentingnya mengatur nasibnya sendiri, “menyelamatkan dahulu kebangsaan Indonesia dengan tenaga sendiri baru membangun persaudaraan antar bangsa.”⁶

Pemikiran-pemikiran di atas menunjukkan bahwa konsolidasi nasionalisme menjadi sangat utama dibandingkan yang lainnya. Negara dan terutama elite-elite pemerintahan harus mengambil segala tindakan yang berorientasi rakyat dan bangsa sendiri ketika berhadapan dengan kepentingan dan kebijakan luar negeri dengan negara lainnya. Dalam kasus kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan Malaysia baru-baru ini, terkait sengketa wilayah dan

⁴ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010, hal 183-185.

⁵ *Ibid*, hal 194.

⁶ *Ibid*, hal. 195-196.

peristiwa penangkapan petugas negara kita oleh pihak otoritas Malaysia, masih belum terlihat sikap membela warga negara sendiri secara maksimal dan adil. Demikian pula cara-cara penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Timur Tengah, masih juga menunjukkan sikap membela kepentingan dan kebijakan negara-negara setempat. Bahkan cenderung menyalahkan warga negara sendiri. Hal ini menunjukkan masih rendahnya rasa nasionalisme para pejabat dan diplomat Indonesia yang bertugas di berbagai negara di seluruh penjuru dunia.⁷

Konsep-konsep Nasionalisme

Bangsa merupakan konsep yang berkaitan dengan identitas etnik kultur yang sama yang dimiliki orang-orang tertentu negara merupakan unit politik berdasarkan teritorial, populasi dan otonomi pemerintah. Terma *nation state* di maknai sebagai tahap-tahap pembauran yang mungkin terjadi antara batas kultural dan politik yang dilakukan oleh suatu otoritas sentral dalam suatu wilayah tertentu. Nasionalisme di definisikan sebagai perspsi identitas seseorang terhadap suatu kolektifitas politik yang terorganisasi secara teritorial seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan negara lainnya.⁸

Konsepsi nasionalisme di atas memiliki banyak perbedaan dengan pemikiran Ernest Renan dari Sorborne, Perancis. Renan menolak konsepsi yang merumuskan bangsa dalam kerangka ras, bahasa dan agama. Faktor-faktor yang menciptakan suatu bangsa adalah jiwa kepahlawanan di masa lalu, peran pemimpin-pemimpin besar dan faktor politik dan sejarah bersama. Menurut Burhan Magenda, pada dekade 1960-1970-an terjadi perkembangan teori nasionalisme yang bersifat multi-disipliner. Salah satunya yang terkenal adalah Karl Deutsch, yang mengatakan proses *nation building* di dorong oleh meningkatnya komunikasi sosial melalui urbanisasi, mobilitas, asimilasi dan pendidikan.

⁷ Penulis pernah mengalami diperlakukan dengan kurang etis oleh aparat keamanan (satpam) KBRI Bangkok. Usai penulis menjadi delegasi sebagai Indonesian Young Leader dalam World Youth Peace Summit Asia Pasific di Bangkok tahun 2004, penulis mendatangi kedutaan RI di Bangkok. Saat sampai di depan kedutaan, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh satpam KBRI asal Thailand adalah “Anda mau apa” dan “Dari TKI Indonesia ya?” Sikap kurang ramah kerap kali penulis alami ketika mengikuti berbagai forum Internasional di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Sikap dan tindakan seperti itu merupakan perilaku khas birokrasi Indonesia.

⁸ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Intenasional, Keadilan, dan Power, Negara Bangsa dan Nasionalime*, Putra A Bardin, Jakarta, 1999. hal 66-67.

Studi tentang nasionalisme yang juga populer adalah teori masyarakat imajiner dari Benedict R.O.G Anderson, di mana anggota-anggota masyarakatnya jarang bertemu satu sama lainnya. Sementara Burhan Magenda dalam studinya tentang nasionalisme, di Cornell University, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa nasionalisme sudah sejak zaman kolonial terdapat komunitas nasional yang bersifat multietnik di kota-kota kabupaten di Indonesia, terutama di luar Jawa.⁹

Menurut Bacon dan Herrmann¹⁰, nasionalisme menekankan pada identitas kolektif nasional yang berfungsi untuk memproteksi negara sebagai satu-satunya sumber otoritas dan legitimasi kekuasaan. Mengutip pendapat Anthony Smith: "*Nationalism expresses and draws attention to certain forces at work in the actions and beliefs of a large number of people in all part of the world, and prescribes roughest outline a program of action for their satisfaction. One theory of nationalism explaining this negative reaction to outside forces (globalization) is based on interpretation on human nature according to which the development of a national identity reflects the deep-seated to belong.* Pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional itu diperhadapkan antara kalah atau menang (*winners or losers*).

Selanjutnya Bacon dan Herrmann mengatakan bahwa "*the essence of nationalism is a personal identification with a global communities, goes against this need to personally identity with a group. A stated formed with no national identity, but with a population that requires identification with some sort of community identification with clans, family units, regional villages, territory, or culture.*"¹¹

Dalam perkembangannya, nasionalisme mengalami perluasan makna karena di pengaruhi oleh faktor globalisasi. Kata kunci dari nasionalisme adalah perasaan kecintaan dan pengorbanan yang di dasarkan pada persamaan etnik, kultur, suku bangsa serta cita-cita bersama. Artinya, meskipun kita berada di luar wilayah Indonesia, namun jika kita masih memiliki rasa kecintaan, kebanggaan dan pengorbanan terhadap negara Indonesia, dapat dikatakan kita masih memiliki rasa nasionalisme. Dalam contoh yang sederhana, kerinduan bagi mereka yang bertempat tinggal di luar negeri terhadap berita-berita soal Indonesia, sikap pembelaan terhadap tim sepak bola Indonesia ketika melawan negara lain, dan bahkan

⁹ Burhan D. Magenda, *op.cit.*, hal 4.

¹⁰ Esther A Bacon dan Collen M. Herrmann, *Ideas Matter: A Diversity of Foreign Policies, The Global Century, Globalization and National Security*, Washington DC: INSS NDU, 2001.

¹¹ *Ibid*, hal 692.

memilih indomie buatan Indonesia dari pada mie buatan negara lain. Semua itu merupakan bagian dari bentuk penerapan nasionalisme.¹²

Pemahaman dan pemaknaan nasionalisme dewasa ini sangat di pengaruhi oleh perubahan dan pergeseran kepentingan politik nasional dan internasional. Jika di tahun 1940-an nasionalisme di artikan sebagai alat politik Negara yang digunakan untuk kepentingan politis dan militer, dewasa ini telah berubah menjadi alat kepentingan ekonomi Negara. Contoh yang nyata adalah konsep “*the great of china*” yang di gagas oleh Presiden Hujintao yang hendak menyatukan warga Cina seluruh dunia sebagai partner pemerintah dan bangsa Cina untuk turut serta membangun Cina. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran nasionalisme Cina yang lebih berorientasi pada aspek pembangunan dan kepentingan ekonomi. Meskipun ratusan juta warga Cina itu sudah menjadi warga negara lain di seluruh penjuru dunia, namun pemerintah Cina mengharapkan keturunan Cina itu bersama-sama memberikan sumbangan untuk kemajuan Cina.¹³

Adhyaksa Dault dalam tulisannya tentang nasionalisme dan demokrasi Indonesia mengatakan bahwa, kekuatan modal mampu mengalahkan kekuatan moral. Karena itu, nasionalisme tanpa supremasi hukum, *rule of law* yang tegas, memiliki transparansi, kepastian dan akuntabilitas, hanya akan menjadi nasionalisme yang hampa makna. Hal ini sangat berbeda dengan Cina yang dalam proses modernisasi dewasa ini dengan tegas memberlakukan *law enforcemen*. Di kota-kota utama Cina terdapat ratusan gedung pencakar langit, taman kota yang luas, jalur pejalan kaki yang teduh dan lebar, transportasi publik dan infrastruktur yang modern tumbuh subur dalam kedipan mata. Cina hari ini memang lemah tertatih akibat krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Namun dengan modal pertumbuhan ekonomi tujuh persen yang stabil, kota-kota di Cina serempak membangun, mempercantik diri dan berlomba-lomba mengundang investasi asing. Ini termasuk memanggil-manggil secara moral keturunan Cina di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi di negeri berpenduduk 1,3 milyar jiwa ini. Tak heran jika dalam lawatan ke Cina beberapa tahun silam, Presiden Megawati Soekarnoputri menyiratkan rasa kagetnya akan kemajuan pembangunan di negeri Cina yang sebagian terbaca dari citra fisik kota-kotanya.¹⁴

¹² Honest Dody Molasy, *Pragmatisme dan Nasionalisme*, Hasil Simposium Internasional PPI Sedunia, Den Haag, 2007, hal 179-187.

¹³ *Ibid*, hal. 187.

¹⁴ Adhyaksa Dault, “Nasionalisme, Transisi Demokrasi Indonesia dan Krisis Multi Dimensi”, makalah, http://rudycr.com/PPS702-ipb/07134/adhyaksa_dault.htm (diakses pada 21 September 2010).

Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia

Proses demokratisasi di Indonesia telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Harus kita akui bahwa ada banyak kemajuan dalam aspek-aspek kunci dari kehidupan bangsa kita, seperti amandemen 1945, penguatan fungsi parlemen, penataan negara dan tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan ekonomi daerah dan perkembangan masyarakat sipil. Semua capaian tersebut mestinya mendorong pembangunan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, nampaknya proses ini baru menghasilkan konsolidasi nasionalisme. Melalui format politik demokrasi yang kita kembali terapkan dalam kehidupan bernegara, berbagai paradoks dan kemungkinan untuk menjadi negara gagal sudah teratasi. Perkembangan ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan serta kepemimpinan pemerintah yang semakin kuat dan solid.

Globalisasi dan demokratisasi global mengakibatkan makin menipisnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan budaya yang kita miliki mengalami involusi (pencemaran) akibat hegemoni dan pengaruh budaya barat dan nilai-nilai universal. Karena itu bangsa Indonesia harus berupaya untuk terus mengkonsolidasi nasionalismenya, terutama terhadap desain demokrasi yang membumi dengan kondisi, sejarah dan geopolitik bangsa Indonesia. Meski demikian, nilai-nilai konstruktif dari dinamika globalisasi, modernisasi dan demokratisasi harus dijadikan sebagai sumber rujukan dan semangat untuk membangun nasionalisme dan kebangsaan.

Bagaimanapun, semua tantangan dan permasalahan kebangsaan yang kita hadapi itu memerlukan kebersamaan semua komponen bangsa, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Posisi dan peran strategis Indonesia di ranah internasional perlu terus digagas dan dilakukan, terutama oleh mereka yang memiliki wewenang, otoritas dan sumber daya untuk menyusun kebijakan nasional dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai prinsip dan tata kelola kenegaraan yang selalu bertitik tolak pada keadilan, penegakan supremasi hukum dan kemanusiaan.

Kepustakaan

Bacon, Esther A. dan Colleen M. Herrmann, *Ideas Matter: A Diversity of Foreign Policies, The Global Century, Globalization and National security*, Washington DC: INSS NDU, 2001.

Magenda, Burhan Djibir, “Konsolidasi Nasionalisme Indonesia, Mengatasi Tantangan Globalisasi dan Primordialisme”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Politik pada FISIP UI, Depok, 6 Desember 2008.

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana PM Group, 2010.

Molasy, Honest Dody, *Pragmatisme dan Nasionalisme, Hasil Simposium Internasional PPI Sedunia*, Den Haag 2007.

Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

